

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN PASCA PEMEKARAN

Ketut Wahyu Dhyatmika, Hastarini Dwi Atmanti¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research aims to 1) analyze the magnitude of the inequality of development that happens in Banten Province after the expansion region; 2) classify the regency/municipalities based on Klassen typology; 3) analyze the influence of foreign direct investment (FDI), government expenditure (GE), and unemployment rate (UE) of inequality of development. Post expansion region in 2000, economic growth banten province tended to increase but followed with inequality will also increase. This research use 1) williamson Index, 2) Klassen typology, and 3) Analysis of panel data by method fixed effect model (FEM) with the time research 2001-2011. The results showed that the level of inequality in Banten Province development tend to increase. Based on Klassen Typology, tangerang and cilegon municipality is at a group of regional forward and fast growing, tangerang to a group of developing areas quickly and other areas located in the prologue and the left. Panel data analysis results with the method of FEM, foreign direct investment (FDI) and government expenditure affect positif and negative against inequality, while the unemployment rate variable has no effect against the inequality of development in Banten Province after the expansion region.

Keywords: Inequality of Development, Williamson Index, Klassen Typology, FEM Panel Data

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Meier (1960) dalam Mugihardjo (2007), pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi yang dilakukan masing-masing daerah tidak dapat lepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain. Menurut Shinta dan Maruto (2010), disparitas pertumbuhan regional dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak perbedaan tingkat kesenjangan antar daerah. Menurut Lincoln Arsyad (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*Trickle Down Effects*" atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat.

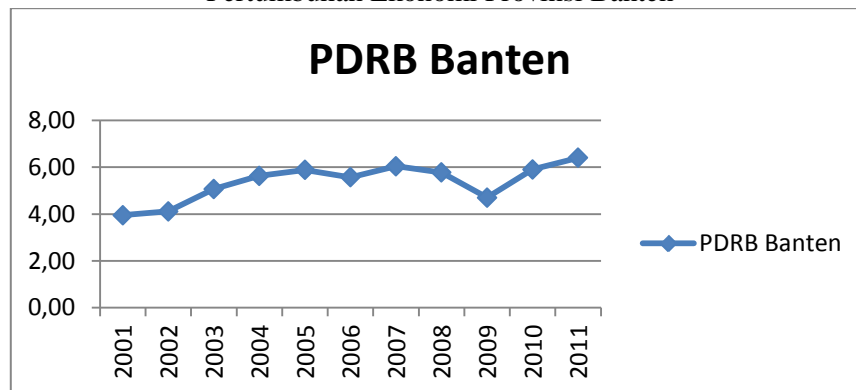
Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi

¹ Penulis Penanggung Jawab

oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets.

Provinsi Banten merupakan bentukan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, membuat perekonomian Banten bergerak cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten



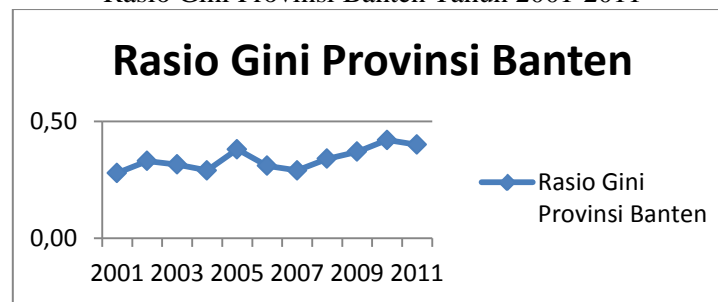
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami tren positif dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun atau melambat. Hal ini dikarenakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat yang secara tidak langsung berimbas pada perekonomian Provinsi Banten.

Ketimpangan pada suatu wilayah atau antar memang merupakan kondisi alamiah atau natural yang terjadi. Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Banten diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini. Pada tahun 2001 rasio gini Provinsi Banten berada pada angka 0,28 atau dapat dikatakan tingkat ketimpangan masih dalam kategori rendah, sedangkan pada tahun 2011 rasio gini Provinsi Banten meningkat menjadi 0,40. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001 sampai tahun 2011, dapat disimpulkan tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat.

Gambar 1
Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2001-2011



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tujuan dari pemekaran suatu wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan. Dalam kurun waktu 11 tahun, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten yang tercermin dari perkembangan rasio gini pada gambar 1.2 cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan positif ternyata tidak serta merta akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.
2. Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Banten berdasarkan tipologi klassen
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012). Simon Kuznet (1955) dalam Todaro (2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

Terjadinya ketimpangan regional menurut Myrdal (1957) disebabkan oleh besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

Hubungan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan

Investasi termasuk didalamnya penanaman modal asing (PMA) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) investasi cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Permintaan yang meningkat di wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

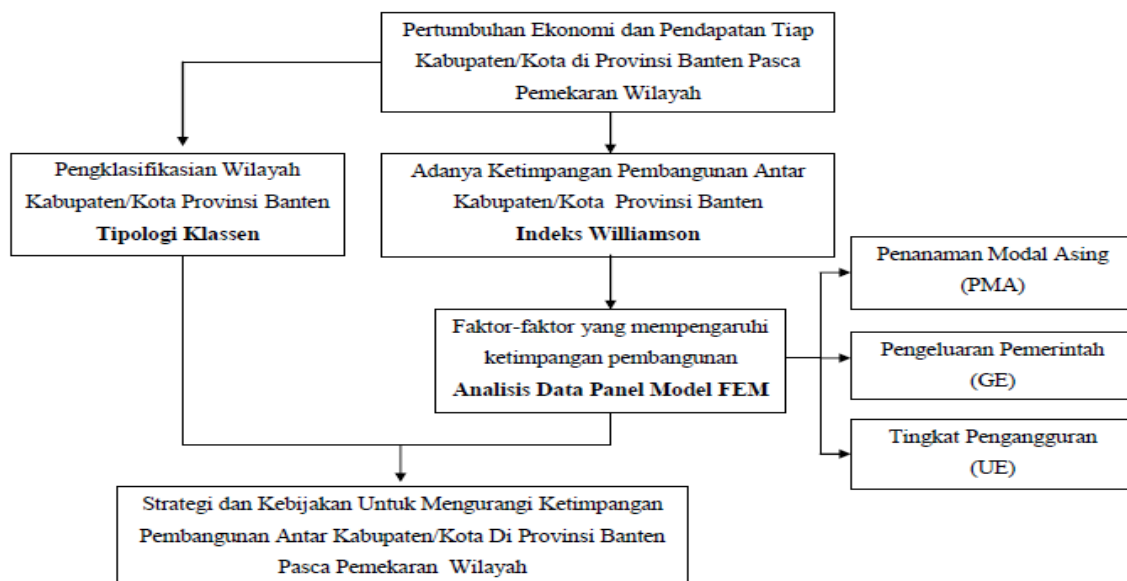
Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan

Menurut Sjafrizal (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah dengan kondisi demografisnya baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan. Lessman (2006) melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran suatu daerah. Menurut Lessman, tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya ketimpangan wilayah.

Gambar 2
Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran



Hipotesis pada penelitian ini adalah 1) diduga tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten meningkat berdasarkan indeks Williamson, 2) diduga penanaman modal asing dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat deskriptif dan verifikatif dimana tujuannya adalah untuk memperoleh suatu gambaran tentang ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui pengujian secara empiris berdasarkan data lapangan dengan menggunakan analisis data panel. Selain itu dilakukan pengklasifikasian daerah yang bertujuan untuk mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten digunakan indeks ketimpangan regional Williamson yang dirumuskan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 x \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

Dimana:

- V_w = Indeks Williamson
- y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i
- \bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Banten
- f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i
- n = Jumlah penduduk di Provinsi Banten

Untuk mengklasifikasikan daerah-daerah di Provinsi Banten digunakan tipologi klassen (Klassen Typology) yang mengelompokan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Tabel 2
Klasifikasi Kabupaten/kota menurut *Klassen Typologi*

\bar{R}	$Y_{ij} > \bar{Y}_j$	$Y_{ij} < \bar{Y}_j$
$R_{ij} > \bar{R}_j$	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat	Kuadran III Daerah berkembang cepat
$R_{ij} < \bar{R}_j$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan	Kuadran IV Daerah tertinggal

Untuk mengetahui pengaruh sejumlah variabel terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten digunakan analisis panel data dengan menggunakan metode *fixed effect* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$V_{wit} = \beta + \beta_1 PMA_{it} + \beta_2 GE_{it} + \beta_3 UE_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

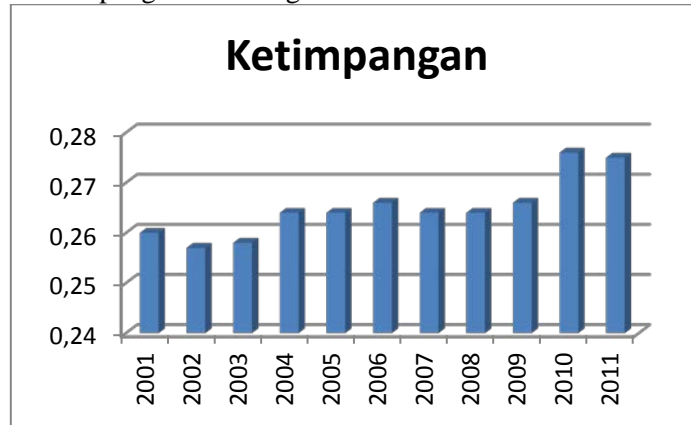
- VW = ketimpangan pembangunan wilayah
- PMA = penanaman modal asing
- GE = pengeluaran pembangunan pemerintah
- UE = tingkat pengangguran
- i = cross section
- t = time series
- β = koefisien
- μ = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ketimpangan pembangunan diukur dengan menggunakan indeks Williamson yang bernilai dikisaran 0 sampai dengan 1. Selama waktu penelitian yaitu 2001-2011, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten cenderung meningkat. Pada tahun 2001, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten sebesar 0,260 kemudian menurun pada tahun 2002 menjadi 0,257.

Akan tetapi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat menjadi 0,266. Tingkat ketimpangan di Provinsi Banten selama kurun waktu penelitian mencapai angka tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,276.

Tabel 3
Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten 2001-2011



Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten dan kabupaten/kota yang berada didalamnya ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Myrdal (Jhingan, 2010) dalam teorinya mengenai dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*) mengemukakan bahwa dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar yang semakin mengecil membuat ketimpangan wilayah di negara-negara terbelakang.

Klasifikasi daerah atau tipologi klasen merupakan suatu alat analisis untuk mengklasifikasikan suatu wilayah ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dicapai serta pendapatan per kapita. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa selama 11 tahun terdapat tiga klasifikasi pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu 1) daerah maju dan tumbuh cepat, 2) daerah berkembang cepat, dan 3) daerah tertinggal.

Tabel 4
Klasifikasi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Berdasarkan Tipologi Klasen

Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat Kota Cilegon, Kota Tangerang	Kuadran III Daerah berkembang cepat Tangerang
Kuadran II Daerah maju tapi tertekan -	Kuadran IV Daerah tertinggal Pandeglang, Lebak, Serang

Pada klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat ditempati oleh Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kedua kota tersebut diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Banten. Klasifikasi berikutnya adalah daerah berkembang cepat yang ditempati Kabupaten Tangerang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang cenderung meningkat dan berada diatas rata-rata provinsi akan tetapi pendapatan per kapitanya berada dibawah rata-rata provinsi. Kemudian yang terakhir klasifikasi daerah tertinggal yang ditempati oleh Kabupaten Pandeglang, Lebak dan

Serang. Ketiga kabupaten tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dibawah rata-rata Provinsi Banten.

Dalam analisis data panel untuk model Fixed Effect, jika asumsi yang dipakai slope koefisien konstan tetapi bervariasi antar individu, maka setiap konstanta dari cross-section memiliki nilai yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan intersep akan diperoleh perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan diantara wilayah-wilayah dummy tersebut apabila dibandingkan dengan Kota Tangerang sebagai benchmark. Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan dengan pendekatan panel data didapat hasil sebagai berikut :

$$VW = 0.172425 + 0.002008PMA - 6.39E-05GE + 0.000506UE + DV$$

$$R^2 = 0,855927$$

$$F\text{-statistik} = 42.32911$$

Dari persamaan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.855927 artinya 85,32% variasi variabel terikat ketimpangan pembangunan mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel-variabel bebasnya yang meliputi penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil studi empiris yang dilakukan, variabel penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah. Tanda parameter penanaman modal asing (PMA) adalah positif yaitu 0.002008 yang menunjukkan apabila PMA naik sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,002008. Variabel penanaman modal asing (PMA) signifikan sebesar 0,0456 pada $\alpha = 10\%$.

Berdasarkan hasil studi empiris, diperoleh variabel pengeluaran pemerintah (GE) untuk pembangunan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah. Tanda parameter pengeluaran pemerintah adalah negatif yaitu -6,39E-05 yang menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar 6,39E-05. Hal ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil studi empiris, diperoleh variabel tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah. Tanda parameter tingkat pengangguran adalah positif yaitu 0,000506 yang menunjukkan apabila tingkat pengangguran atau naik sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,000506. Akan tetapi variabel tingkat pengangguran (UE) tidak signifikan di alpha (α) 10%, artinya variabel tingkat pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran pada tiap kabupaten/kota Provinsi Banten yang cukup rendah selama tahun penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan, ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten selama periode penelitian cenderung meningkat. Pengklasifikasian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menurut tipologi Klassen terdapat tiga klasifikasi yaitu 1) daerah maju dan cepat tumbuh, 2) daerah berkembang, dan 3) daerah tertinggal. Daerah yang berada pada klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat adalah Kota Cilegon dan Kota Tangerang, untuk daerah berkembang terdapat Kabupaten Tangerang dan pada daerah tertinggal terdapat Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang. Model regresi dengan menggunakan model Fixed Effect pengaruh penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

tahun 2001-2011 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Penanaman modal asing yang tidak merata antar daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini berarti kenaikan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi. Sedangkan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran yang relatif kecil di Provinsi Banten.

REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
Badan Pusat Statistik, Banten Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Banten
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lessman, Christian. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A panel data approach for OECD countries*. Ifo Working Papers. <http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1197172.PDF>. Diakses tanggal 20 Oktober 2012.
- Mugihardjo dan Febra Robiyanto. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori dan Kebijakan*. Semarang: Studi Nusa Semarang
- Nugraha, Shanti Shintia dan Maruto Umar Basuki. 2007. “*Disparitas Pendapatan Anta Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Wilayah Pantura Propinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2003)*”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol 4, No 1, hal 33-46. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. 9 ed. Jakarta: Erlangga